

FRES

LAMPUNG 2012

FORUM RISET
EKONOMI DAN BISNIS

Bandar Lampung, 18 - 19 Desember 2012

PROCEEDING

OJK Harapan Baru
Sistem Keuangan
Indonesia



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Universitas Lampung

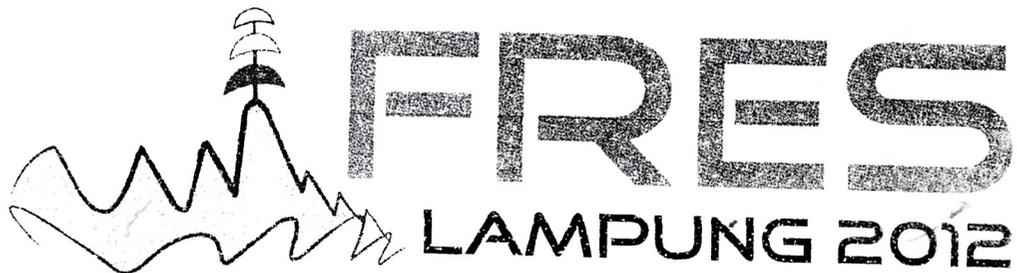


05

ISBN 978-979-19119-7-9



<http://www.feb.unila.ac.id>



FORUM RISET EKONOMI DAN BISNIS

Bandar Lampung, 18 - 19 Desember 2012

PROCEEDING

**OJK Harapan Baru
Sistem Keuangan
Indonesia**



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Universitas Lampung



PROCEEDING FORUM RISET EKONOMI DAN BISNIS 2012

Tim Editor :

1. Muhammad Husaini, S.E., MEP.
2. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si.
3. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si.
4. Dr. Yuliansyah, S.E., MSA. Akt.
5. Aida Sari, S.E., M.Si.
6. Dr. Ayi Ahadiat, S.E., MBA.

Diterbitkan oleh : Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Lampung
Tahun 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Makalah : Aplikasi Desentralisasi Fiskal Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung

Nama Jurnal : Forum Riset Ekonomi dan Bisnis (FRES),
Lampung 2012, PROCEEDING- OJK Harapan
Baru Sistem Keuangan Indonesia, Halaman 49-58

Identitas Pemakalah/Peneliti

Nama Lengkap dan Gelar : Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si. (Ketua)
Jenis Kelamin : Laki-laki
NIP : 196112091988031003
Disiplin Ilmu : Ekonomi Regional
Pangkat/Golongan : Pembina/Iva
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/ Ekonomi Pembangunan

Bandarlampung, 5 Maret 2015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Pemakalah/ Peneliti



Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si
NIP. 196109041987031011

Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si
NIP. 196112091988031003

Menyetujui

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
Universitas Lampung.

Dr. Eng. Admi Syarif
NIP. 196701031992031003

DOKUMENTASI LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	24 MAREK 2015
NO. INVEN	27/0426/8/UPM/2015
JENIS	Proceeding
PARAF	

DAFTAR ISI

	HAL
SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNILA	1
LAPORAN KETUA PANITIA PELAKSANA FRES 2012	2
PROPOSAL SEMINAR NASIONAL DAN FORUM RISET EKONOMI & BISNIS 2012	3
DAFTAR ISI	7
JADWAL ACARA PARALEL SESSION	11
 EKONOMI PEMBANGUNAN:	
DETERMINAN VOLUME EKSPOR DI INDONESIA PERIODE 1990 – 2010 Irma Febriana M.K & Nurbetty Herlina Sitorus	15
DIVIDED GOVERNMENT (PEMERINTAHAN TERBAGI) DAN KINERJA EKONOMI DAERAH Nairobi	24
ANALISIS PENGARUH EKSPOR INDUSTRI MANUFaktur PADA KINERJA MAKROEKONOMI INDONESIA (ANALYSIS OF THE EFFECT OF MANUFACTURING EXPORTS TO INDONESIA MACROECONOMIC PERFORMANCE) Saimul	39
✓ APLIKASI DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BANDAR I Wayan Suparta & Imam Awaludin	49
STUDI PENGARUH PERUBAHAN NILAI TUKAR RUPIAH PER DOLAR AS TERHADAP INFLASI SELAMA PERIODE INFLATION TARGETING DI INDONESIA (Periode 2005:7 s.d 2011:6) Yoke Muelgini	59
KAJIAN SIGNIFIKANSI DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA KABUPATEN INDUK DAN PEMEKARAN DI ERA OTONOMI DAERAH TAHUN 2005-2010 (Studi Kasus: Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Lampung Utara) Yurni Atmadja	68
HUBUNGAN HUKUM BANK INDONESIA DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Zulfi Diane Zaini	90
KAJIAN EKSPLORATIF MENGAPA MODEL EKONOMI BAGI HASIL TETAP EKISIS DI MASYARAKAT Heru Wahyudi	98
ANALISIS PEMANFAATAN BANTUAN MODAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA Sulistya Rini Pratiwi	113
SUKUK RETAIL BASED ON MOBILE PAYMENT: MENINGKATKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR MELALUI OPTIMALISASI DAN KOMBINASI TELEPON SELULER DAN SUKUK RETAIL Muhammad Idris & Tiara Nirmala	123

FAKTOR EKTERNAL DAN INTERNAL YANG MEMPENGARUI PROPORSI ASET PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Moneyzar Usman & Heru Wahyudi	139
---	-----

MANAJEMEN:

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STABILITAS KINERJA MANAJERIAL BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH Muslimin	163
PERBANDINGAN KINERJA MENEJEMEN SYARIAH DENGAN MANAJEMEN KONVENSIONAL (PERSPEKTIF GAJI KARYAWAN) Habibullah Jimad	170
ANALISIS KOMPETISI PERBANKAN DI INDONESIA Dariyus, M. Syatibi Ch , Muslimin	183
PENGARUH KEBIJAKAN BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR HONDA DI BANDAR LAMPUNG Driya Wiryawan & Dorothy Rouly H. Pandjaitan	188
IDENTIFIKASI SUMBER STRES TENAGA PENGAJAR PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG Zainnur M. Rusdi	208
COMPUTER USAGE READINESS, E-COMMERCE READINESS DAN E-BUSINESS READINESS PADA INDUSTRI KREATIF SUBSEKTOR AGRIBISNIS (STUDI PADA USAHA KECIL MENENGAH KERIPIK PISANG DI BANDAR LAMPUNG) Wheny Khristianto	212
ANALISIS FAKTOR PEMBENTUK LOYALITAS KONSUMEN SUPERMARKET DI BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN FAKTOR MARKETING ACTIVITY DAN BRAND EQUITY Rinaldi Bursan	227
PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP PERUBAHAN LOGO (STUDI PADA BANK BNI DAN TELKOM) Roslina	235
PENGARUH KEPERCAYAAN DAN KUALITAS LAYANAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH ASURANSI DI BANDAR LAMPUNG Yuniarti Fihartini	244
RESUFFLE KABINET 2011 DAN ABNORMAL RETURN DI PASAR MODAL INDONESIA Sri Hasnawati	251
PENGARUH PERUBAHAN ORGANISASI, BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAAN KERJA DAN KINERJA DOSEN PADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG Yuningsih	259
PERANAN MODEL TIGA FAKTOR TERHADAP PEMBENTUKAN PORTOFOLIO EFISIEN SAHAM LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA Prakarsa Panji Negara	269
KEBIJAKSANAAN PROMOSI ROGRAM KELUARGA BERENCANA MELALUI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI BANDAR LAMPUNG Mustafid	280

APLIKASI DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BANDAR LAMPUNG

I Wayan Suparta
Dosen FEB Universitas Lampung

Imam Awaludin
Dosen FEB Universitas Lampung

ABSTRAK

Persoalan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) telah mendapatkan perhatian yang besar sejak beberapa abad yang silam yaitu sejak zamannya Adam Smith (salah seorang tokoh ekonom Klasik). Pertumbuhan ekonomi cerminan atas peningkatan ketersediaan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan manusia sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup. Pertumbuhan ekonomi merupakan sumber utama peningkatan standar hidup penduduk yang jumlahnya terus meningkat. Dengan perkataan lain, kemampuan dari suatu Negara atau daerah untuk meningkatkan standar hidup penduduknya sangat dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi jangka panjang (*long run rate of economic growth*) yang terjadi.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah diawali dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini selanjutnya disempurnakan maka keluarlah UU No. 32 Tahun 2004. Pada tahun 1999 telah dikeluarkan pula UU No. 25 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang kemudian diubah dengan UU No. 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang itu telah ditetapkan untuk memberikan kewenangan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, sehingga pembangunan ekonomi daerah semakin baik. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung merupakan salah satu tolok ukur prestasi pembangunan ekonomi atas kemampuannya dalam mengelola keuangan (baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran) secara efisien dan efektif dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Tujuan dari penelitian ini adalah tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh peningkatan PAD per tenaga kerja dan peningkatan investasi pemerintah per tenaga kerja Kota Bandar Lampung terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung. Data yang digunakan adalah data rangkai waktu (*time series*) periode 2001 – 2010. Alat analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa PAD per tenaga kerja dan investasi pemerintah per tenaga kerja Kota Bandar Lampung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Desentralisasi Fiskal, Tenaga Kerja, Investasi Pemerintah, dan PAD.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah dilaksanakan untuk pemerataan dan menyebarluaskan pembangunan di daerah dengan tujuan untuk menyetarakan dan menyeimbangkan atau memperkecil perbedaan tingkat laju pertumbuhan antar daerah, serta memadukan seluruh kegiatan pembangunan di daerah dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan nasional secara menyeluruh (Sibero :1985). Pembangunan ekonomi suatu daerah (*region*) berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimiliki oleh daerah

serta adanya keterkaitan (*linkage*) kegiatan ekonomi antar daerah sekitarnya. Potensi ekonomi maupun karakteristik yang dimiliki suatu daerah pada umumnya berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya (Glasson, 1977; dalam Wayan Suparta, 2006).

Dalam konteks pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi menjadi penting artinya karena sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah atas penerapan desentralisasi fiskal. Maju tidaknya suatu daerah bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi semakin maju pula suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi sebagai cerminan atas peningkatan ketersediaan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan manusia sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup. Pertumbuhan ekonomi dapat juga menjadi barometer peningkatan standar hidup penduduk yang jumlahnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Dengan perkataan lain, kemampuan dari suatu negara atau daerah untuk meningkatkan standar hidup penduduknya dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonominya dalam jangka panjang (*long run rate of economic growth*) (Muana Naga, 2005).

Desentralisasi fiskal merupakan peluang bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan dan membiayai sendiri kemajuan pembangunan di daerahnya masing-masing untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Pembangunan daerah dalam bidang ekonomi diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan serta pembiayaan agar terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung baru dikatakan ada bila jumlah fisik barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang diukur dalam besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga pada tahun tertentu. Perkembangan kenaikan PDRB Kota Bandar Lampung sejak tahun 2001-2010 atas dasar harga tahun 2000 secara rata-rata adalah sebesar Rp 19,36583 Milyar atau tumbuh sebesar 6,5 % (BPS Lampung Dalam Angka (berbagai edisi)). Rata-rata perkembangan investasi pemerintah Kota Bandar Lampung sejak tahun 2001-2010 adalah sebesar Rp 15,654 Milyar atau tumbuh sebesar 21,34 % . Rata-rata perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung sejak tahun 2001-2010 adalah sebesar Rp 6,999 Milyar atau tumbuh sebesar 16,01 % (www.djpk.depkeu.go.id) dan perkembangan rata-rata tenaga kerja Kota Bandar Lampung sejak tahun 2001-2010 adalah sebesar Rp 1,3178 juta tenaga kerja atau tumbuh sebesar 3,99 % (Kota Bandar Lampung Dalam Angka (beberapa edisi)).

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung yang dicapai di atas karena pemerintah Kota Bandar Lampung telah melaksanakan otonomi daerah sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sejak dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, namun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh peningkatan PAD dan peningkatan investasi pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung. Sehubungan dengan latar belakang dan masalah penelitian maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh peningkatan PAD dan peningkatan investasi pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung.

II. STUDI LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow

Model pertumbuhan Solow memberi kontribusi positif terhadap teori pertumbuhan neoklasik sehingga Solow dianugerahi Hadiah Nobel bidang ekonomi. Model pertumbuhan neoklasik Solow berpegang pada konsep skala hasil yang semakin berkurang (*diminishing returns*) dari input tenaga kerja dan modal jika keduanya dianalisis secara terpisah. Jika keduanya dianalisis secara bersama atau sekaligus, Solow memakai asumsi skala hasil tetap (*constant returns to scale*). Kemajuan teknologi ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dan

tinggi rendahnya pertumbuhan itu sendiri diasumsikan bersifat eksogen atau tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Pada intinya, model ini merupakan pengembangan dari formulasi Harrod-Domar dengan menambahkan faktor tenaga kerja dan teknologi ke dalam persamaan pertumbuhan. (M. P. Todaro, 2003).

Model Pertumbuhan Solow berangkat dari fungsi produksi agregat sebagai berikut:

$Y = Af(K,L)$; Dimana Y adalah output, K adalah modal (*capital*) L adalah tenaga kerja dan A merupakan teknologi. Asumsi yang digunakan antara lain: (1) *constant return to scale* untuk kedua unsurnya bahwa jika kuantitas kapital dan efektif *labor* digandakan (melalui K dan L dengan porsi tetap) maka output akan berlipat ganda pada porsi yang sama. Asumsi ini memberikan dua asumsi tambahan yaitu perekonomian harus cukup besar dan input-input selain K , A , dan L misalnya sumberdaya alam dan lahan relatif kurang penting.

Input-input dalam model dapat berubah setiap saat sehingga asumsi-asumsi yang digunakan memperhatikan perubahan-perubahan pada stok *labor*, pengetahuan dan kapital. Diasumsikan *labor* dan pengetahuan bertumbuh dengan tingkat yang konstan $L(t) = nL(t)$ dan $A(t) = gA(t)$. Output dibagi dari pendapatan misalkan sebesar s (akan digunakan untuk investasi). Bagian yang dicurahkan untuk investasi ditentukan berdasarkan penyusutan yang dilakukan yaitu δ . Berkaitan dengan kapital, satu unit kapital terdepresiasi dengan laju δ . Jadi diperoleh evolusi kapital : $\Delta K(t) = sf(k(t) - (n+g+\delta)k(t))$. Persamaan ini menunjukkan tingkat perubahan stok kapital per unit efektif *labor* sama dengan perbedaan antara investasi aktual per efektif *labor* dan investasi *break event* (Mankiw, 2000, 174).

Desentralisasi Fiskal

UU No. 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah, pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dimana kota dan kabupaten bertindak sebagai "motor" sedangkan pemerintah provinsi sebagai koordinator. Undang-undang ini mengatur desentralisasi (pelimpahan wewenang dan tanggung jawab) di bidang administrasi dan di bidang politik kepada pemerintah daerah. Dengan adanya pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dengan diikuti perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, pengelolaan dan penggunaan anggaran diharapkan sesuai dengan prinsip "*money flow function*" yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Desentralisasi fiskal juga tidak bisa lepas kaitannya dengan upaya untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, efisiensi penggunaan keuangan negara, serta prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia lebih ditekankan pada aspek pengeluaran atau belanja dengan memperbesar porsi di daerah. Hal ini memiliki berbagai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu kondisi antar daerah yang sangat heterogen, antara lain dapat dilihat dari jumlah penduduk, luas wilayah, kepadatan penduduk, kondisi geografis, kondisi dan potensi perekonomian daerah. Pengeluaran pemerintah daerah tersebut diimbangi dengan penerimaan daerah.

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004, sumber-sumber keuangan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan merupakan sumber utama pembiayaan daerah pada era desentralisasi fiskal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu sumber pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Dana-dana yang bersumber dari PAD merupakan salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Yang termasuk ke dalam PAD terdiri dari:

- 1) Pajak daerah. Adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai

peranan ganda yaitu: (i) sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*), (ii) sebagai alat pengatur (*regulatory*).

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan PP No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.

- 2) **Retribusi daerah.** Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembiayaan atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Retribusi daerah terdiri atas tiga golongan yaitu: (i) retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; (ii) retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan (iii) retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 3) **Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya.** Pendapatan ini diperoleh dari Badan Usaha Milik daerah (BUMD). Karena itu daerah antusias mendirikan BUMD dengan maksud untuk menjadi sumber pendapatan daerah utama untuk mengisi kas APBD.
- 4) **Lain-lain pendapatan yang sah.** Penerimaan ini berasal dari penerimaan hasil penjualan barang milik daerah, jasa giro, sumbangan pihak ketiga, penerimaan mess milik pemda dan penerimaan dinas-dinas serta penerimaan lainnya (Ramdan Ruhedi Dedi dalam Abdul Halim, 2001).

III. METODA PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu yaitu sejak 2001 sampai dengan 2010. Data yang dihimpun berasal dari publikasi dinas atau instansi pemerintah, diantaranya adalah publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai PDRB kota Bandar Lampung dan data ketenagakerjaan Kota Bandar Lampung, publikasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan Republik Indonesia (djpk.depkeu.go.id) mengenai realisasi APBD kota Bandar Lampung serta berbagai sumber lainnya yang relevan seperti jurnal, publikasi ilmiah di internet, buku, dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.

Model ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada model pertumbuhan Solow yaitu :

$$Y = f(K,L) \dots\dots\dots 1$$

Dimana output (Y) dipengaruhi oleh input *capital* (K) dan *Labor* (L). Dengan memperhatikan faktor regional (dalam hal ini adalah PAD kota Bandar Lampung) dan Kapital didekati (*proxy*) dengan investasi pemerintah (IG) Kota Bandar Lampung, maka model Solow dapat ditulis menjadi:

$$PDRB=f(IG, PAD, TK). \dots\dots\dots 2$$

Untuk mendapatkan fungsi produksi perpekerja maka semua variable dibagi dengan TK, maka model Solow dengan modifikasi adalah sebagai berikut:

$$PDRB/TK=f(IG/TK, PAD/TK). \dots\dots\dots 3$$

Dengan asumsi bahwa hubungan antar variabel pada persamaan 3 tidak linear, maka persamaan 3 dapat ditulis menjadi:

$$PDRB/TK = (IG/TK)^{\beta_1} (PAD)^{\beta_2} \dots\dots\dots 4$$

Agar persamaan 4 dapat diaplikasikan maka persamaan tersebut ditransformasi menjadi bentuk log yaitu:

$$\text{Log (PDRB/TK)} = \beta_1 \text{ log(IG/TK)} + \beta_2 \text{ log(PAD/TK)} \dots\dots\dots 5$$

Karena variable terikat tidak pasti hanya dipengaruhi oleh ke dua variable bebas pada persamaan 5 tetapi masih ada variable lain yang ikut mempengaruhi variasi nilai variable terikat, maka keterkaitan antar variable terikat dengan variable bebas pada persamaan 5 dapat ditulis dalam model ekonometrik menjadi:

$$\text{Log (PDRB/TK)} = \beta_0 + \beta_1 \text{ log(IG/TK)} + \beta_2 \text{ log(PAD/TK)} + \text{et} \dots\dots\dots 6$$

Berdasarkan penjelasan di atas, maka persamaan 6 adalah model analysis yang digunakan pada penelitian ini.

Batasan viabel:

- β_0 = Tetapan (Konstanta)
- β_1 - β_2 = Nilai koefisien regresi parsial
- PDRB/TK = Perkembangan atau laju pertumbuhan ekonomi perpekerja yang diproksi dengan perkembangan PDRB/TK Kota Bandar Lampung periode 2001-2010 (dalam jutaan rupiah) sebagai variabel terikat.
- IG /TK = Perkembangan Investasi pemerintah perpekerja (pengeluaran untuk belanja modal/pembangunan) Kota Bandar Lampung peiode 2001-2010 (dalam juta rupiah) sebagai variabel bebas.
- PAD/TK = Perkembangan Pendapatan Asli Kota Bandar Lampung perpekerja periode 2001-2010 (dalam jutaan rupiah) sebagai variabel bebas.
- et = Kesalahan pengganggu.

Pengujian Hipotesis

a. Uji t-Statistik

Uji t merupakan suatu pengujian secara statistic yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi masing-masing variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan. Pengujian hipotesis untuk setiap koefisien regresi dilakukan dengan uji-t (*t student*). Untuk variabel pertumbuhan investasi pemerintah/tenaga kerja dilakukan uji satu arah, dan pertumbuhan pendapatan asli daerah pertenaga kerja dilakukan uji dua arah pada tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 0,05$. Derajat kebebasan yang digunakan adalah $df = n - k - 1$, dimana n = jumlah observasi dan k = jumlah variabel bebas yang digunakan.

Hipotesis yang digunakan adalah:

- i. Untuk variabel investasi pemerintah per tenaga kerja
 - Ho: $\beta_1 = 0$: Tidak berpengaruh
 - Ha: $\beta_1 > 0$: Berpengaruh positif
 - Apabila: $t_{hitung} < t_{tabel}$: Ho diterima dan Ha ditolak
 - $t_{hitung} > t_{tabel}$: Ho ditolak dan Ha diterima
 - Jika Ho diterima, berarti variabel investasi pemerintah per tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung. Jika Ho ditolak, berarti pertumbuhan investasi pemerintah per tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung.
- ii. Untuk variabel pendapatan asli daerah pertenaga kerja
 - Ho: $\beta_2 = 0$: Tidak berpengaruh
 - Ha: $\beta_2 \neq 0$: Berpengaruh
 - Apabila: $t_{hitung} > -t_{\alpha/2}$ atau $t_{hitung} < t_{\alpha/2}$: Ho diterima dan Ha ditolak
 - $t_{hitung} < -t_{\alpha/2}$ atau $t_{hitung} > t_{\alpha/2}$: Ho ditolak dan Ha diterima
 - Jika Ho diterima, berarti pendapatan asli daerah pertenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung. Jika Ho ditolak, berarti pertumbuhan pendapatan asli daerah pertenaga kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung.

b. Uji F-Statistik

Uji F-Statistik merupakan uji secara statistic yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas signifikan dalam mempengaruhi variasi nilai variabel terikat secara bersama-sama. Pengujian hipotesis dilakukan pada tingkat kepercayaan 95% atau $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan $df_1 = k - 1$ dan $df_2 = n - k$, dimana $n =$ jumlah observasi dan $k =$ jumlah variabel bebas yang digunakan.

Hipotesis yang dikemukakan adalah :

Hipotesis nol (H_0) : $\beta_i = 0$: tidak berpengaruh signifikan

Hipotesis alternatif (H_a): $\beta_i \neq 0$: berpengaruh signifikan

Kriteria: Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka semua variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat secara signifikan, maka H_0 ditolak. Demikian pula sebaliknya.

IV. HASIL PERHITUNGAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Perhitungan

Berdasarkan hasil perhitungan bahwa pengaruh masing-masing variabel bebas investasi pemerintah pertenaga kerja (IG/TK), dan Pendapatan Asli Daerah pertenaga kerja (PAD/TK) terhadap variabel terikat (PDRB/TK) dengan menggunakan data runtun waktu periode 2001 – 2010, maka hasil *ordinary least square (OLS)* dengan menggunakan persamaan 6 adalah sebagai berikut:

Table 1. Hasil Regresi Data pada Taraf signifikansi 95% atau $\alpha = 5\%$

Variabel	Koefisien	t-statistik	t-tabel	Probabilitas
pad	0,1457	2,2820	1,895	0,0565
ig	0,0848	2,5083	2,365	0,0405
c	3,1105	33,3472	1,895	0,0000

Sumber : Lampiran 1

Berdasarkan Table 1 diketahui bahwa semua variabel bebas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tingkat signifikansi 95%. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung lebih besar daripada nilai t table. Dilihat dari masing-masing variabel, diperoleh:

1. Koefisien pertumbuhan Investasi Pemerintah (ig) tandanya positif, sesuai dengan yang diharapkan.
2. Koefisien pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (pad) signifikan dengan tanda positif, sesuai dengan harapan.

Pengujian Hipotesis

Uji t dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan. Derajat kebebasan yang digunakan adalah $df = n - k - 1 = 10 - 2 - 1 = 7$. Untuk variabel pendapatan asli daerah pertenaga kerja (pad) dilakukan uji dua arah sedangkan variabel investasi pemerintah pertenaga kerja (ig) dilakukan uji satu arah dengan tingkat keyakinan 95%.

Berdasarkan pengujian koefisien regresi pada masing-masing variable bebas maka dapat diketahui bahwa:

- a) Untuk variabel pendapatan asli daerah pertenaga kerja (pad) memiliki nilai t-hitung $>$ t-tabel (0,05/2) pada tingkat kepercayaan 95 persen maka H_0 ditolak. Artinya bahwa secara statistic peningkatan penerimaan pad berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada pelaksanaan desentralisasi fiskal (Tabel 1).
- b) Untuk variabel investasi pemerintah pertenaga kerja (ig) memiliki nilai t-hitung $>$ t-tabel pada tingkat kepercayaan 95 persen maka H_0 ditolak yang artinya pertumbuhan investasi pemerintah secara statistik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada pelaksanaan desentralisasi fiskal (Tabel 1).

Uji F merupakan uji yang dilakukan untuk menguji koefisien determinasi (R^2). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variasi variabel bebas signifikan mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama. Pengujian ini dilakukan pada tingkat kepercayaan 95 % dengan $df_1 = k-1 = 3-1 = 2$ dan $df_2 = n-k = 10-3 = 7$, maka diperoleh nilai F-tabel sebesar 4,74. Karena F-hitung > F-tabel, maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Hal ini berarti bahwa secara statistik keseluruhan variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung. Hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 2. Hasil Uji F pada tingkat kepercayaan 95%

Variabel Bebas	F-hitung	F-tabel	Kesimpulan
Pad, ig	32,7275	4,74	H_0 ditolak, H_a diterima

Sumber : Lampiran 01

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Nilai R^2 digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan semua variabel bebas yang digunakan dalam persamaan 6 dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Dari hasil analisis diperoleh nilai R^2 sebesar 0,9033, hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini mampu menjelaskan variasi variabel terikat (pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan pdrb pertengahan kerja) sebesar 90,33%, sedangkan sisanya (9,67%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Pengujian Asumsi Klasik.

Pengujian asumsi Klasik dilakukan untuk mendeteksi apakah terjadi penyimpangan terhadap persoalan asumsi klasik seperti Heteroskedastisitas, Otokorelasi dan Multikolineariti. Telah dilakukan pengujian Heteroskedastisitas dan Otokorelasi ternyata tidak terjadi persoalan Heteroskedastisitas dan Otokorelasi (Lampiran 2 dan 3). Pengujian kolinearitaspun telah dilakukan dengan menggunakan uji VIF (*Variance Inflating Factor*). Hasil VIF-nya adalah 3,126 artinya tidak terjadi kolinearitas yang parah diantara sesama variabel bebas.

Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pertumbuhan PAD pertengahan kerja (pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari hasil analisis diketahui bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung dengan koefisien sebesar 0,1457. Ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan PAD mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Pusparini (2006) bahwa rasio PAD berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia.

Sesungguhnya PAD merupakan indikator yang menjadi barometer kesuksesan desentralisasi fiskal di Indonesia. Daerah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhannya melalui alokasi sumber daya yang dimilikinya secara efisien dan efektif. Pertumbuhan yang terjadi di daerah seyogyanya harus didukung oleh kuatnya PAD, karena pada PAD terkandung unsur pajak daerah dan retribusi daerah dan sumber pendapatan lain yang sah yang benar-benar digali dari daerah itu sendiri.

Didalam perekonomian, pemungutan pajak kepada masyarakat memiliki dua dampak. Di satu sisi, dengan dikenakannya pajak maka pendapatan daerah tersebut semakin tinggi. Di sisi lain, dengan dikenakannya pajak akan memberatkan masyarakat karena pengenaan pajak tersebut akan mengurangi

pendapatan masyarakat dan dunia usaha. Keadaan seperti ini mengindikasikan bahwa pemungutan pajak kepada masyarakat bersifat kontraktif, yaitu dengan semakin tingginya pajak yang dikenakan kepada masyarakat maka pertumbuhan ekonomi akan semakin rendah.

Pengaruh positif ini hendaknya menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Bandar Lampung. Pemerintah hendaknya lebih berhati-hati dalam menciptakan dan menentukan tarif pajak daerah dan retribusi daerah. Penciptaan dan penerapan pajak dan retribusi hendaknya tidak semata-mata hanya untuk peningkatan kuantitas PAD tetapi juga memperhatikan kepentingan publik. Berdasarkan pengujian data yang ada bahwa kebijakan fiskal yang relative sesuai adalah kebijakan fiskal ekspansif (menurunkan pajak) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung. Untuk itu pemerintah Kota Bandar Lampung hendaknya lebih memperhatikan lagi undang-undang yang mengatur tentang PAD dan kriteria-kriteria penilaian Pendapatan Asli Daerah yaitu kriteria hasil (*yield*), kriteria keadilan (*equity*), kriteria efisiensi ekonomi, kriteria kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), dan kriteria kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.

2. Pengaruh Investasi Pemerintah pertenaga kerja (ig) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Investasi Pemerintah secara statistik terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung, yakni sebesar 0,0848. Ini sesuai dengan hipotesa yang diajukan. Hubungan yang positif ini dapat diartikan bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan investasi pemerintah Kota Bandar Lampung sebesar satu persen akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung tersebut sebesar 0,0848 persen, *ceteris paribus*.

Adanya pengaruh positif ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Joko Tri Haryanto (2006). Hal inilah yang sebenarnya menjadi salah satu tujuan dari diberlakukannya desentralisasi fiskal di Indonesia dimana masing-masing daerah secara bijak untuk mengalokasikan anggarannya untuk investasi pada berbagai sector misalnya pada sektor pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi. Pengaruh positif ini juga sesuai dengan pernyataan Kuncoro (2004) yang menyatakan bahwa pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah mempunyai hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi.

Investasi pemerintah yang dimaksud dalam hal ini merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam APBD untuk belanja modal atau pembangunan. Pengeluaran pemerintah di dalam perekonomian memiliki sifat yang ekspansif, yang berarti apabila pengeluaran pemerintah semakin meningkat maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Investasi pemerintah dapat berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Peningkatan investasi pemerintah (belanja modal/pembangunan) akan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan. Jika bertambah besar alokasi pada belanja modal atau pembangunan berbagai infrastruktur maka akan secara positif meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dibangun oleh masyarakat dan pemerintah Kota Bandar Lampung. Ketersediaan infrastruktur inilah yang pada akhirnya dapat memicu masuknya pihak swasta sebagai pendorong pada sisi lain terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung.

V. SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Simpulan yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini adalah perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung. Pengaruh yang positif ini dapat diartikan bahwa kebijakan fiskal ekspansif lebih baik dilakukan daripada kebijakan fiskal kontraktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung. Perkembangan investasi pemerintah secara statistik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung pada pelaksanaan desentralisasi fiskal. Pengaruh positif ini dapat diartikan bahwa kebijakan ekspansif dibidang investasi yaitu dengan meningkatkan pengalokasian pengeluaran pemerintah untuk belanja modal atau pembangunan secara bijak akan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung.

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung hendaknya memberi perhatian yang lebih mendalam untuk *mereview* kriteria Pendapatan Asli Daerah dari sudut pandang kepentingan publik. Penciptaan

sumber-sumber PAD baru secara relative akan lebih baik daripada peningkatan tarif pajak dan dari sumber-sumber penerimaan lainnya. Pengenaan pajak serta retribusi hendaknya tidak semata-mata hanya untuk peningkatan kuantitas PAD tetapi juga memperhatikan keadilan dan kemampuan untuk mencapai pemenuhan kepentingan publik. Pengeluaran pemerintah untuk belanja modal atau pembangunan (investasi pemerintah) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, maka peneliti menyarankan kiranya pemerintah Kota Bandar Lampung dapat terus meningkatkan realisasi investasi pemerintah di bidang publik. Investasi tersebut dapat berupa pembangunan dan perbaikan infrastruktur untuk menarik investor swasta baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Erwin. 2003. Dampak Desentralisasi Fiskal di Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Nusa Tenggara Barat. *Tesis*. Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung. 2001. Lampung Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung. 2004. Lampung Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung. 2008. Lampung Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung. 2010. Lampung Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Dedy, Ramdan Ruhedi. 2001. Upaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam Abdul halim (ed). *Bunga Rampai (manajemen Keuangan Daerah)*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Fadjar A. D. 2007. Efektivitas faktor input dan ketimpangan pendapatan daerah di Indonesia Setelah Desentralisasi Fiskal. *Market outlook*.
- Glasson, John, 1977; *Pengantar Perencanaan Regional*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta, Erlangga (Alih Bahasa: Drs. Ah. Sumarno Zain, MBA).
- Haryanto, Joko Tri. 2006. Desentralisasi Fiskal dan Kontribusinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Studi Kasus Kabupaten/Kota di Indonesia. *Tesis*. Magister Sains Ekonomi Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok, Jakarta.
- Jamzani Sodik. 2005. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Hal 27-36. UPN "Veteran" Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga.
- Makmun dan Akhmad Yasin. 2003. Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDB Sektor Pertanian. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol.7, No.3.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Pengantar Ekonomi*. Edisi kedua. Jilid 2. Alih bahasa, Haris Munandar. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Naga, Muana. 2005. *Makro Ekonomi: Teori, Masalah dan kebijakan*. Edisi kedua. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Pujiati, Amin. 2008. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Universitas Negeri Semarang.
- Pusporini, Dewi. 2006. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Era Desentralisasi Fiskal. *Tesis*. Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Depok, Jakarta.
- Sibero, A. 1985; Peningkatan Kemampuan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, *Prisma No. 12*, Desember 1985.
- Sidik, Machfud, Raksaka Mahi. 2002. *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan dan Prospek di era Otonomi Daerah*. Jakarta; Kompas.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta.
- Wibowo, Puji. 2008. Mencermati Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, vol. 5, No. 1, Oktober 2008. Hal 55-83.
- www.bandarlampungkota.go.id

